ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Perkembangan Kota Gunungsitoli Tahun 2008-2024

Novi Kristina Telaumbanua[1]*, Najmi[2]
[1,2] Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
* telaumbanuanovikristina@gmail.com

ABSTRACT

Gunungsitoli is the only city on Nias Island that was officially established as an autonomous city through Law Number 47 of 2008. Since then, the city has experienced significant developments in economic, infrastructural, and socio-cultural aspects. This study aims to analyze the background of the establishment of Gunungsitoli as a result of the administrative division from Nias Regency and to examine the city's development from 2008 to 2024. This research employs the historical research method consisting of four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings indicate that the establishment of Gunungsitoli was influenced by local government policies, the strong aspirations of the Nias community to obtain better public services, and the support of the Nias Regency government. Since its inauguration, Gunungsitoli has experienced rapid development in various sectors, marked by the completion of the government center in 2016, the revitalization of three major markets (Pasar Nou, Pasar Gomo, and Pasar Soliga), improvements and expansion of the road network reaching all six districts, the development of Gunungsitoli (Angin) Port and Binaka Airport as regional transportation facilities, as well as the increase in educational, health, and housing facilities. By 2024, development had reached all areas of Gunungsitoli, although it had not been entirely evenly distributed, as the central urban areas continued to develop more rapidly than peripheral areas, particularly Idanoi District and Gunungsitoli Alo'oa District. This development accelerated following the inauguration of the first definitive mayor in 2011 and continued through 2024. Nevertheless, challenges remain, including regional development disparities and the need to improve human resource quality and ensure sustainable governance.

Keywords: City Development, Gunungsitoli, Autonomous City, Regional Expansion, Infrastructure

ABSTRAK

Kota Gunungsitoli merupakan satu-satu kota di Pulau Nias yang resmi ditetapkan sebagai Kota Otonom melalui Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008. Sejak saat itu, kota ini mengalami berbagai perkembangan signifikan dalam aspek ekonomi, infrastruktur, dan sosial budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang terbentuknya Kota Gunungsitoli sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Nias serta mengkaji perkembangan kota tersebut dari tahun 2008 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan empat tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terbentuknya Kota Gunungsitoli dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah lokal, aspirasi kuat masyarakat Nias untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih baik, serta pemerintah daerah Kabupaten Nias. Sejak diresmikan, Kota Gunungsitoli mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang, ditandai dengan pembangunan pusat pemerintahan yang selesai pada tahun 2016, revitalisasi tiga pasar utama (Pasar Nou, Pasar Gomo, dan Pasar Soliga), peningkatan kualitas dan perluasan jaringan jalan hingga menjangkau enam kecamatan,

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

pengembangan pelabuhan angin Gunungsitoli dan bandara binaka sebagai sarana transportasi regional, serta bertambahnya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Hingga tahun 2024, pembangunan telah menjangkau seluruh wilayah Kota Gunungsitoli, meskipun tingkat perkembangannya belum sepenuhnya merata karena wilayah pusat kota masih berkembang lebih cepat dibandingkan kawasan pinggiran, terutama Kecamatan Idanoi dan Gunungsitoli Alo'oa. Perkembangan ini semakin menguat sejak pelantikan wali kota definitif pertama pada tahun 2011 dan berlanjut hingga 2024. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa ketimpangan pembangunan antarwilayah dan perlunya peningkatan kualitas SDM serta tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Perkembangan Kota, Gunungsitoli, Kota Otonom, Pemekaran Daerah, Infratruktur.

PENDAHULUAN

Kota Gunungsitoli merupakan salah satu daerah dari kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Pulau Nias dan berjarak 85 mil laut dari Sibolga. Secara geografis, kota ini terletak pada 1°17' LU dan 97°37' BT, berbatasan dengan Kabupaten Nias Utara di sebelah Utara, Kabupaten Nias di sebelah Selatan, Samudera Hindia di Sebelah Timur, dan Kabupaten Nias di sebelah Barat. Secara administratif, kota ini terbagi atas enam kecamatan dengan total luas wilayah ± 469,36 km² dan 101 desa/kelurahan. Letak geografis yang strategis ini menjadikan Kota Gunungsitoli sebagai pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa di Kepulauan Nias. Sebelum menjadi daerah otonom, Gunungsitoli berstatus sebagai ibu kota Kabupaten Nias sehingga berbagai aktivitas pemerintahan dan perekonomian telah berpusat di wilayah ini. Setelah resmi dimekarkan menjadi Kota Gunungsitoli melalui Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008, pemerintah kota memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri. Perubahan status tersebut mendorong percepatan pembangunan melalui penyusunan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perkembangan infrastruktur, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi berlangsung lebih pesat dibandingkan pada masa sebelum pemekaran.

Kota Gunungsitoli merupakan satu-satunya kota di Pulau Nias dan dikenal sebagai pusat budaya, ekonomi, dan pemerintahan di Kepulauan Nias. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008, Kota Gunungsitoli resmi ditetapkan sebagai daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Nias, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto pada tanggal 26 November 2008. Status kota otonom ini memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dikenal oleh masyarakat luas, Kota Gunungsitoli lebih mengedepankan nilai-nilai budaya dalam pembentukan dan pembangunan kota, yang tercermin dari upaya pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya Nias melalui berbagai kebijakan pembangunan serta pelestarian warisan budaya yang masih dilakukan hingga saat ini.

Perkembangan kota merupakan suatu perubahan menyeluruh yang menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat kota, baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

maupun fisik. Sejak tahun 2008 hingga 2024, Kota Gunungsitoli menjalani fase krusial pembangunan, dari masa transisi pemerintahan hingga berjalannya roda pembangunan yang lebih terencana pascapelantikan wali kota definitif pertama pada tahun 2011. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai kebijakan strategis diterapkan secara berkesinambungan, mencakup pembangunan pusat pemerintahan, pengembangan infrastruktur jalan, revitalisasi pasar, pengembangan pelabuhan dan bandara, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Proses pembangunan ini tidak berjalan mulus, mengingat tantangan yang dihadapi, mulai dari ketiadaan infrastruktur pemerintahan di awal pemekaran hingga dampak pandemi Covid-19 yang menghambat laju pembangunan pada tahun 2020-2022.

Berbagai kajian terdahulu memberikan kerangka perbandingan yang relevan untuk memahami perkembangan Kota Gunungsitoli. Pertama, penelitian Rika Vera Vidiana tentang Sejarah Kota Lubuksikaping (2000-2015) menunjukkan bahwa perkembangan kota pasca otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan kepala daerah dan pembangunan infrastruktur publik. Kedua, skripsi Emelia tentang Tanjungpinang (1983-2010) mengungkapkan bagaimana sebuah kota bertransisi dari status administratif menjadi kota otonom melalui geliat pembangunan sarana dan prasarana. Ketiga, penelitiab Harry Melky Putra Mendrofa tentang ketersediaan fasilitas Kota Gunungsitoli pasca gempa (2006-2010) memberikan gambaran awal bahwa pemulihan pasca bencana menjadi titik awal penting bagi perkembangan Kota Gunungsitoli. Keempat, tulisan dari Dr. Chanif Nurcholis dan Ace Sriati Rachman tentang Kota Depok sebagai daerah otonom baru menekankan pentingnya pelayanan dasar, mekanisme politik yang stabil, dan dukungan masyarakat sebagai faktor keberhasilan sebuah kota otonom baru. Dari keempat kajian ini, dapat disimpulkan bahwa kajian mendalam mengenai perkembangan Kota Gunungsitoli setelah resmi menjadi kota otonom pada tahun 2008 belum banyak dilakukan, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Secara konseptual, penelitian ini merujuk pada teori sejarah kota (urban history) yang menekankan bahwa kota adalah entitas dinamis yang terus mengalami transformasi dari waktu ke waktu dalam aspek sosial, ekonomi, budaya dan fisik (Mumford; Kuntowijoyo). Sejarah kota tidak hanya mencakup proses pembentukan kota dan struktur fisiknya, melainkan juga berbagai dimensi kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga dinamika di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kota Gunungsitoli termasuk dalam tipologi kota menengah dengan jumlah penduduk 145.233 jiwa pada tahun 2024, berpola terpusat (kosentris), serta berfungsi sebagai kota pemerintahan, perdagangan, dan budaya. Dengan pemahaman teori ini, dinamika perkembangan Kota Gunungsitoli dianalisis sebagai cerminan dari adaptasi masyarakat dan pemerintah terhadap tuntutan zaman, sekaligus sebagai bukti konkret dari keberhasilan desentralisasi dalam mendorong kemajuan daerah.

Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan dokumentasi historis atas perjalanan pembangunan Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom baru yang masih dalam proses

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

konsolidasi. Dua permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah: (1) latar belakang terbentuknya Kota Gunungsitoli sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Nias, dan (2) perkembangan Kota Gunungsitoli dari tahun 2008 hingga 2024 dalam berbagai bidang pembangunan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada studi sejarah kota dan pembangunan daerah, khususnya dalam memahami transformasi wilayah pascapemekaran. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam memahami dinamika pembangunan Kota Gunungsitoli, serta menjadi bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan ke depan yang lebih tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan utama. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami perubahan dan kontinuitas perkembangan Kota Gunungsitoli dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya selama periode 20082024. Penggunaan metode sejarah memungkinkan peneliti untuk menelusuri fakta-fakta historis secara sistematis dan mengintegrasikan menjadi narasi yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Daliman, 2012).

Tahap pertama adalah heuristik, yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber yang relevan.Sumber primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan 16 informan, antara lain penjabat dari Bapperida, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli dan masyarakat setempat. Sumber primer juga mencakup dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008, RPJMD Kota Gunungsitoli, berbagai periode, RKPD, laporan kinerja dinas, dan data BPS Kota Gunungsitoli. Sumber sekunder berupa buku, jurnal, skripsi yang relevan dengan topik penelitian. Menuru Nina Herlina (2020) heuristik adalah langkah awal yang sangat menentukan kualitas penelitian sejarah, karena kecukupan dan keandalan sumber akan menentukan kedalaman analisis yang dapat dilakukan.

Tahap kedua adalah kritik sumber, yaitu tahap pengujian dan penilaian terhadap sumber yang telah dikumpulkan. Kritik ini meliputi kritik eksternal, yaitu menguji keaslian sumber berupa memverifikasi tanggal pembuatan dokumen, keaslian fisik sumber, dan kredibilitas narasumber, serta kritik internal, yaitu menguji kebenaran informasi dengan cara membandingkan berbagai dokumen dan keterangan wawancara. Kritik lisan juga dilakukan dengan mencermati kesesuaian informasi dari wawancara narasumber, apakah mereka merupakan pelaku langsung, saksi, atau pihak yang mengalami perubahan fisik kota selama periode tersebut (Sjamsuddin, 2007). Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu menganalisis data yang telah diverifikasi untuk menemukan hubungan antara fakta-fakta sejarah. Data empiris dikombinasikan dengan teori-teori perkembangan kota untuk membangun pemahaman yang menyeluruh tentang dinamika Kota Gunungsitoli. Tahap keempat adalah historiografi, yaitu penulisan sejarah secara sistematis dan ilmiah

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

berdasarkan hasil interpretasi, sehingga menghasilakan narasi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Terbentuknya Kota Gunungsitoli

Sebelum menyandang status sebagai Kota Otonom, Gunungsitoli merupakan sebuah kecamatan yang sekaligus menjadi ibu kota Kabupaten Nias serta berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pelayanan masyarakat di Kepulauan Nias. Dalam catatan sejarah, wilayah ini telah dikenal sejak abad ke-16 dengan nama Luaha atau Kota Luaha, yaitu sebuah kawasan di muara Sungai Nou yang berkembang sebagai pelabuhan alami dan pusat perdagangan antardesa maupun antarpulau. Posisi geografisnya yang strategis menjadikan Gunungsitoli sebagai pintu utama ke Pulau Nias sehingga perdagangan, pemerintahan, dan interaksi sosial masyarakat terpusat di wilayah ini. Memasuki masa pemerintahan kolonial Belanda, peran Gunungsitoli semakin menguat sebagai pusat administrasi dan perdagangan di Pulau Nias, yang ditandai dengan pembangunan pelabuhan, perkantoran pemerintah, serta fasilitas umum. Namun, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, luasnya wilayah Kabupaten Nias menyebabkan rentang kendali pemerintah menjadi kurang efektif sehingga pelayanan kepada masyarakat belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Kondisi tersebut mendorong lahirnya aspirasi masyarakat dan para tokoh daerah untuk membentuk Kota Gunungsitoli sebagai daerah ptpnom. Mereka menilai bahwa dengan berdirinya Kota Otonom, akselerasi pembangunan akan lebih mudah dicapai karena kebijakan dapat disesuaikan langsung dengan kebutuhan lokal tanpa harus melalui birokrasi kabupaten yang jauh dari jangkauan masyarakat kota.

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Gambar 1. Dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI

DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten Nias pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Nias, perlu dilakukan pembentukan Kota Gunungsitoli di wilayah Provinsi Sumatera Utara;

c. bahwa pembentukan Kota Gunungsitoli bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam

Lingkungan . . .

Sumber: BPK RI

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Gambar 2. Gambaran Kota Gunungsitoli saat ini (Tahun 2026)



Sumber: https://share.google/JKOoiAZLr6rSrRxuH

Memasuki era reformasi dan desentralisasi, semangat pemekaran daerah di seluruh Indonesia semakin menguat, termasuk di Kepulauan Nias. Proses pemekaran dimulai secara formal melalui Keputusan DPRD Kabupaten Nias Nomor 02/KPTS/2000 tanggal 1 Mei 2000 yang menyetujui pemekaran Kabupaten Nias, di bawah kepemimpinan Bupati Binahati B. Baeha. Bupati Binahati dikenal sebagai figur yang responsif terhadap aspirasi pemekaran, mengingat wilayah Kabupaten Nias yang luas menyebabkan rentang kendali pemerintahan menjadi tidak efektif dan pelayanan publik tidak merata. Selain dari kalangan birokrat dan tokoh formal, aspirasi pemekaran juga tumbuh kuat dari masyarakat. Para tokoh adat (Salawa Banua), pemuka agama, tokoh pemuda, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan secara bersama-sama menyuarakan pentingnya Gunungsitoli memliki pemerintahannya sendiri.

Peran Ir. Lakhomizaro Zebua sebagai Ketua Harian Badan Persiapan Pembentukan (BPP) Kota Gunungsitoli sangat penting dalam mengkoordinasikan seluruh proses administrasi pembentukan daerah otonom. Berdasarkan penjelasan Ir. Analisman Harefa, ST selaku Kepala Bapperida Kota Gunungsitoli, proses pemekaran tidak hanya

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

dilakukan melalui penyusunan dokumen administratif, tetapi juga melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintahan Kabupaten Nias, pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, serta Kementerian Dalam Negeri agar seluruh persyaratan pembentukan daerah otonom dapat dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Analisman, 2026). Selain itu, berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan DPRD Kabupaten Nias turut memberikan dukungan politik maupun sosial terhadap usulan pembentukan Kota Gunungsitoli.

Proses administratif pembentukan Kota Gunungsitoli berlangsung secara bertahap. Pada tanggal 29 Maret 2007 Bupati Nias mengirimkan usulan resmi pembentukan Kota Gunungsitoli kepada Gubernur Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Nis mengeluarkan persetujuan pada 10 Mei 2007, dan pada 17 September 2007 DPRD Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Keputusan Nomor 11/K/2007 tentang persetujuan pemekaran. Puncak dari seluruh rangkaian administratif terjadi pada 11 November 2007 ketika Gubernur Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Nias, dan Bupati Nias menandatangani dokumen dukungan sebagai salah satu persyaratan pengajuan Rancangan Undang-Undang pembentukan Kota Gunungsitoli kepada pemerintah pusat. Seluruh dokumen tersebut menjadi dasar pembahasan Rancangan Undang-Undang di tingkat nasional hingga akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara, yang diundangkan pada 26 November 2026.

Terbentuknya Kota Gunungsitoli tidak hanya merupakan hasil pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat dan para tokoh daerah yang menginginkan pemerintah yang lebih efektif serta pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Setelah Kota Gunungsitoli resmi dibentuk, pemerintah pusat mengangkat Ir. Lakhomizaro Zebua sebagai penjabat wali kota untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemerintah daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah, serta peyelenggaraan pemilihan kepala daerah pertama. Tahap transisi tersebut berakhir setelah Martinus Lase dan Aroni Zendrato dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota definitif pada tanggal 13 April 2011. Pelantikan tersebut menandai dimulainya pemerintahan definitif sekaligus menjadi awal pelaksanaan pembangunan Kota Gunungsitoli secara lebih terarah melalui penyusunan RPJMD, pembangunan pusat pemerintahan, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan pelayanan publik.

Perkembangan Kota Gunungsitoli Tahun 2008-2024

Pusat Pemerintahan

Sebagai daerah otonom yang baru terbentuk, kota gunungsitoli menghadapi berbagai tantangan dalam proses konsolidasi pemerintahan, salah satunya adalah ketidaaan infrastruktur pemerintahan yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Merianto Mendrofa dari Bapperida Kota Gunungsitoli, diperoleh keterangan bahwa pada awal pembentukan kota gunungsitoli tidak terdapat persiapan bangunan pemerintahan sama sekali, sehingga pemerintahan kota terpaksa menggunakan gedung milik Kabupaten

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Nias sebagai kantor sementara (Merianto, 2026). Kondisi semacam ini lazim dijumpai pada daerah-daerah otonom baru di Indonesia, di mana persiapan administrative dan infrastruktur sering kali belum sepenuhnya matang ketika suatu daerah resmi dimekarkan.

Menyadari kondisi tersebut, Wali Kota Martinus Lase mengambil langkah strategis untuk membangun kantor pusat pemerintah yang mandiri dan representatif. Pembangunan dimulai pada tahun 2014 di Jl. Pancasila No. 14, Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, dan diselesaikan pada tahun 2016 dibawah kepemimpinan Wali Kota Lakhomizaro Zebua. Pada 26 November 2016, gedung pusat pemerintah Kota Gunungsitoli resmi diresmikan penggunannya oleh wali kota Lakhomizaro Zebua bersama Gubernur Sumatera Utara H. Tengku Erry Nuradi dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoli. Kehadiran para pejabat tinggi tersebut dalam acara peresmian mencerminkan betapa pentingnya keberadaan gedung pusat pemerintahan ini, baik dari perspektif kelembagaan pemerintahan daerah manapun dalam konteks pembangunan Pulau Nias secara keseluruhan. Keberadaan gedung ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat koordinasi administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat.

Pasar

Pasar merupakan salah satu unsur penting dalam Perkembangan Kota Gunungsitoli karena keberadaannya telah menyatu dengan sejarah lainnya kota tersebut.sejak masa ketika Gunungsitoli masih dikenal dengan nama Kota Luaha, kawasan ini telah berkembang sebagai pusat aktivitas perdanggangan karena letaknya yang strategis di muara sungai Nou. Posisi geografi tersebut menjadikan Gunungsitoli sebagai titik pertemuan jalur perdagangan masyarakat Nias, baik antar desa maupun antar pulau.dengan demikian, perkembangan kota tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pasar yang menjadi pusat distribusi barang sekaligus ruang interaksi sosial masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Nias, pasar dikenal dengan istilah *Fasa,*yaitu tempat berlangsungnya aktivitas jual beli, pertukaran informasi, serta interaksi sosial yang mempertemukan masyarakat dari berbagai Wilayah di Kepulauan Nias. Hingga saat ini, Kota Gunungsitoli memiliki tiga pasar utama, yaitu Pasar Nou, Pasar Gomo, dan Pasar Soliga. Pasar Nou merupakan pasar tertua yang telah ada sejak masa pemerintah kolonial belanda, Pasar Gomo mulai berkembang pada dekade 1970-an sebagai pasar pendukung di Kawasan Jalan Gomo, sedangkan Pasar Soliga dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat di Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Selatan.

Perkembangan pasar di Kota Gunungsitoli lebih banyak diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana dibandingkan dengan penambahan jumlah pasar. Selama bertahun-tahun setelah berdirinya kota, jumlah pasar tetap tiga, namun pemerintah daerah melakukan berbagai upaya penataan melelui renovasi,perluasan, dan revitalisasi fasilitas pasar. Kondisi fisik ketiga pasar berada pada wilayah dengan topografi relatif datar, meskipun Pasar Nou memiliki tantangan tersendiri karena lokasinya berdekatan dengan

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Sungai Nou sehingga sering mengalami banjir ketika curah hujan tinggi. Kondisi tersebut kerap menghambat aktiviitas perdangangan dan mobilitas masyarakat. Selain itu, keterbatasan lahan parker dan tingginya aktivitas becak motor serta kendaraan angkutan barang masih menjadi penyebab terjadinya kemacetan disekitar Kawasan pasar. Meskipun demikian, ketiga pasar tetap menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan pokok Masyarakat, seperti ikan, sayuran, buah-buahan, daging, telur, pakaian, kain, barang elektronik, hingga berbagai jenis jasa yang menunjang kehidupan ekonomi Masyarakat Kota Gunungsitoli.

Transformasi Pembangunan pasar semakin terlihat pada masa pemerinth Wali Kota Lakhomizaro Zebua. Pada tahun 2018, pemerintah Kota Gunungsitoli merencanakan pembangunan Pasar Nou semi modern dengan anggaran sekitar Rp150 miliar sebagai bagian dari program pengembangan kawasan perdagangan perkotaan. Proyek tersebut meliputi pembangunan kios permanen bertingkat, los perdagangan, sistem drainase, area parkir, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, pada tahun yang sama dilakukan penataan Kawasan perdagangan dan kuliner di Pasar Gomo untuk mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil masyarakat. Proses pembangunan Pasar Nou mulai direalisasikan pada tahun 2019 dengan merelokasi sementara para perdagang kebekas terminal lama Gunungsitoli. Setelah pembangunan selesai secara bertahap pada tahun 2021, para pedagang kembali menempati bangunan baru yang lebih tertata dan representatif. Sementara itu pengembangan Pasar Soliga dilakukan dalam skala yang lebih kecil melalui pembangunan kios-kios serta penataan are perdagangan secara bertahap. Berbagai pembangunan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pasar sekaligus memperkuat peran sektor perdagangan sebagai penggerak ekonomi daerah.

Selain mengalami perkembangan fisik, pasar di Kota Gunungsitoli juga berkembang sebagai ruang sosial yang mencerminkan keberagaman masyarakat. Keberadaan pedagang dari berbagai kelompok etnis merupakan hasil proses migrasi yang berlangsung sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ketika Gunungsitoli berkembang sebagai pelabuhan perdagangan dan pusat administrasi kolonial Belanda di Pulau Nias. Pedagangan dari etnis Minangkabau, Batak, Jawa, dan Tionghoa datang memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia, kemudian jumlahnya semakin meningkatkan setelah kemerdakaan Indonesia, terutama pada periode 1960-1980 seiring berkembangnya perdagangan antar pulau. Masyrakat Nias mengenal para pendatang tersebut dengan sebutan *Niha Siefo*. Keberagaman etnis ini membentuk jaringan perdagangan yang saling melengkapi karena masing-masing kelompok memiliki pola usaha, sistem distribusi, dan jaringan pemasok yang berbeda. Sebagian memanfaatkan hubungan dengan daerah asal untuk memperoleh pasokan barang secara berkelanjutan, sementara yang lain lebih berfokus pada aktivitas perdagangan dipasar lokal. Interaksi antarpedagang dari berbagai latar belakang tersebut menjadikan pasar di Kota Gunungsitoli bukan hanya sebagai pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang integrasi sosial yang memperlihatkan kehidupan masyarakat yang

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

multikultural dan dinamis.

Sarana dan Prasarana

Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan menjadi prioritas utama pembangunan di kota Gunungsitoli karena jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang sangat diperlukan untuk mempermudah akses masyrakat antarsatu wilayah lainnya. Ketersediaan jaringan jalan yang memadai berperan penting dalam mendukung mobilitas penduduk, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pembangunan jalan juga menjadi slah satu indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Pada tahun 2017, jalan dalam kondisi baik meliputi jalan nasional sepanjang 15,25 km, jalan provinsi 14,82 km, dan provinsi 15,28 km, dan jalan 267,20 km. Kondisi tersebut kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2020, dimana panjang jalan kota dalam kondisi baik mencapai 267,20 km. Peningkatan ini menunjukan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas infrastruktur jalan secara bertahap melalui program pembangunan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Namun, pada tahun 2021-2022, pembangunan jalan sempat terhenti karena anggaran dialihkan untuk penanganan pandemik Covid-19. Pembatasan aktivitas masyarakat serta kendala distribusi material juga turut memperlambat pelaksanaan proyek konstruksi, mengakibatkan sejumlah ruas jalan yang semestinya mendapat peningkatan kualitas menjadi tertunda penangananya. Akibatnya, beberapa ruas jalan mengalami penurunan kondisi sehingga jumlah jalan dengan kategori rusak ringan maupun rusak berat meningkat. Pemerintah Kota Gunungsitoli kemudian melakukan evaluasi terhadap program pembangunan infrastruktur jalan pascapandemi dengan menyusun kembali skala prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kerusakan jalan serta ketersedian anggaran

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

daerah.

Tabel 1. Kondisi Jalan Menurut Kecamatan di di Kota Gunungsitoli (2023)

Kecamatan	Panjang Jalan (km)	Kondisi Baik (km)	Kondisi Sedang (km)	Kondisi Rusak Ringan (km)	Kondisi Rusak Berat (km)
Gunungsitoli Idanoi	77,36	33,00	13,30	16,05	15,01
Gunungsitoli Selatan	54,49	28,51	7,05	8,29	10,63
Gunungsitoli Barat	39,98	14,25	9,42	3,39	12,92
Gunungsitoli	132,68	71,67	20,73	23,84	16,44
Gunungsitoli Alo'oa	46,63	16,34	10,69	10,81	8,79
Gunungsitoli Utara	82,16	20,68	8,11	30,06	23,30
Total	433,29	184,45	69,31	92,44	87,09

Sumber: Dinas PUPR Kota Gunungsitoli, 2023

Berdasarkan data tersebut, sekitar 42% jalan berada dalam kondisi baik pada tahun 2023, dengan kecamatan Gunungsitoli Utara mencatat proporsi jalan rusak ringan tertinggi (30,06). Sementara itu, Kecamatan Gunungsitoli Barat memiliki proporsi jaan rusak berat yang cukup tinggi dibandingkan kecamatan lainnya, sehingga kedua kecamatan tersebut menjadi wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam program perbaikan dan peningkatan kualitas jalan. Kondisi menunjukkan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur telah mengalami kemajuan, masih terdapat kesenjangan kualitas jalan antar wilayah yang memerlukan penanganan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kondisi ini terus meningkat pada tahun 2024, dimana persentase jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang). Mencapai 73,99% dari total Panjang jalan 545.544,67 meter, melampaui target RPJMD sebesar 68,36% (laporan kinerja dinas PUPR Kota Gunungsitoli, 2024). Keberhasilan ini merupakan bukti nyata efektivitas tata kelola perencanaan infrastruktur yang terstruktur dan beriorentasi pada hasil, dimana survei dan perencanaan dilakukan di akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan sehingga proses tender dapat dipercepat dan kualitas pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.selain meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek, kebijakan tersebut juga memberikan waktu yang lebih memadai bagi penyedia jasa konstruksi untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifik teknis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembangunan jalan tidak

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

hanya berorientasi pada pencapaian target kuantitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas infrastruktur yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Gunungsitoli.

Pelabuhan

Pelabuhan Gunungsitoli, yang dikenal juga sebagai Pelabuhan Angin, merupakan urat nadi utama konektivitas kepulauan Nias dengan wilayah luar. Pelabuhan ini berlokasi di Jl. Yos Sudarso Ujung, Ombolata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, dan melayani kapal penumpang, kapal Ro-Ro, serta kapal kargo yang membawa berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Pada periode 2008-2016, pelabuhan ini tidak mengalami pengembangan yang signifikan, salah satunya karena belum adanya mitra strategis dari sector badan usaha pelabuhan yang turut memperlambat realisasi pengembangan, mengingat keterbatasan kapasitas teknis dan finansial pemerintah daerah dalam mengelola infrastruktur maratim secara mandiri.

Titik balik terjadi tahun 2017 ketika pemerintah kota Gunungsitoli menandatangani Nota kesepahaman (MoU) dengan PT pelabuhan Indonesia (pelindo) pada 20 juni 2017. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Direktur Bisnis pelindo I, Syahputera Sembiring, bersama Wali Kota Lakhomizaro Zebua, dengan tujuan menyesuaikan program pembanguan fisik pelabuhan dengan kebijakan daerah. Meskipun demikian, realisasi pembangunan fisik pelabuhan tidak serta-merta berjalan setelah penandatanganan tersebut, dan kondisi diperparah dengan hadirnya pandemic Covid-19. Realisasi fisik pengembangan baru dimulai pada Februari 2024 dan diresmikan pada akhir November 2024. Terminal baru dilengkapi dengan ruang tunggu, ruang VIP, ruang laktasi, mushola, dan fasilitas modern lainnya, yang secara keseluruhan meningkatkan kenyamanan dan kualitas layanan bagi penumpang yang menggunakan pelabuhan Gunungsitoli (RRI Gunungsitoli, 2024).

Bandara Udara Binaka

Bandara Udara Binaka berlokasi sekitar 16 km dari pusat Kota Gunungsitoli, tepatnya di wilayah Gido Kabupaten Nias. Ide pembangunan bandara diprakarsai oleh Dalihuku Mendrofa, yang menjabat sebagai bupati Nias sekaligus perwira aktif Angkatan Udara Indonesia, dengan keyakinan bahwa bandara akan membantu memecah isolasi pulau dan mendorong modernisasi Nias. Pada periode awal pasca pemekaran, landasan pacu masih berdimensi 1.800 m x 30 m sehingga hanya mampu melayani pesawat berukuran kecil seperti ATR-72 600 dan Grand Caravan, yang sangat membatasi pilihan maskapai dan rute penerbangan menuju Kepulauan Nias.

Pada tahun 2013, Menteri Perhubungan E.E Mangindaan menyetujui penambahan landas pacu, dan pada tahun 2014 Kementrian Perhubungan mengalokasikan anggaran untuk perpanjangan dari 1.800 m menjadi 2.250 m guna mengakomodasi pesawat narrow-body. Pada 7 Agustus 2016, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung pengembangan bandara dengan anggaran APBN senilai Rp3,8 miliar untuk perpanjangan menjadi 2.600 m x 30 m. Momentum penting berikutnya datang dari penyelenggaraan Sail

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Nias 2019 yang menjadi katalis bagi peningkatan berbagai fasilitas bandara secara menyeluruh. Hingga tahun 2024, pelebaran runway dari 30 m menjadi 45 m terus dilakukan agar Bandara Binaka dapat didarati pesawat jenis Boeing 737 dan Airbus A320, membuka konektivitas yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pariwisata bagi Kepulauan Nias (Majalah Lintas, 2024)

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat setelah Kota Gunungsitoli resmi menjadi daerah otonom. Sebagai pusat aktivitas masyarakat di Kepulauan Nias, Gunungsitoli sejak lama telah menjadi tujuan utama masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan. Setelah pemekaran daerah, Pemerintah Kota Gunungsitoli memiliki kewenangan mengelola pendidikan secara mandiri melalui Dinas pendidikan, sehingga berbagai kebijakan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Pembangunan pendidikan diarahkan pada pemerataan akses peningkatan mutu layanan, penyediaan sarana dan prasarana serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu sebagai upaya mendukung program wajib belajar.

Perkembangan infrastruktur pendidikan menunjukan tren yang positif. Pada tahun 2010 tercatat terdapat 103 sekolah Dasar (SD), 29 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 25 Sekolah Menengah Atas (SMA). Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan, terutama pada periode 2016-2020. Gedung SD/MI meningkat dari 105 unit menjadi 115 unit, SMP/MTs dari 34 unit menjadi 40 unit, dan SMA/MA dari 16 unit menjadi 18 unit. Peningkatan tersebut menunjukan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan diseluruh wilayah Kota Gunungsitoli.

Pada tahun ajaran 2023/2024, Kota Gunungsitoli memiliki 116 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dengan jumlah peserta didik mencapai 35.753 orang. Sebaran sekolah tidak merata di setiap kecamatan, dimana Kecamatan Gunungsitoli memiliki jumlah sekolah terbanyak, sedangkan Kecamatan Gunungsitoli Barat memiliki jumlah sedikit. Meskipun jumlah sekolah yang tercatat lebih rendah dibandingkan data sebelumnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan penggabungan sekolah dan penyesuian administrasi pendidikan sehingga menghasilkan data lebih akurat. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga meningkatkan kualitas pendidikan melalui seleksi kepala sekolah dan pengawasan yang lebih profesional, sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mendukung pembangunan Kota Gunungsitoli secara berkelanjutan.

Kesehatan

Perkembangan fasilitas kesehatan di Kota Gunungsitoli juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Keberadaan sarana Kesehatan merupakan salah satu indicator penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin lengkap dan merata fasilitas kesehatan yang tersedia, maka semakin mudah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Oleh

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

karena itu, pemerintah Kota Gunungsitoli terus berupaya meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Pada tahun 2020, terdapat 8 puskesmas dan 18 puskesmas pembantu. Selain itu juga tersedia 39 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 3 poliklinik, dan 36 pratik dokter yang tersebar di berbagai wilayah Kota Gunungsitoli. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan tersebut menunjukkan kepada masyarakat dari tahun ke tahun. Jumlah ini meningkat secara konsisten, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kota Gunungsitoli 2016–2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Puskesmas	6	6	6	8	8
Puskesmas Pembantu	18	18	18	18	18
Pos Kesehatan Desa	39	39	39	39	39
Poliklinik	40	44	6	4	3
Praktek Dokter	18	22	23	25	36

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, 2021

Pada tahun 2024, jumlah sarana kesehatan pemerintah mencapai 53 unit, terdiri dari 1 rumah sakit, 8 puskesmas, 4 klinik/balai kesehatan, dan 40 Poskesdes/Polindes. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan maupun rujukan. Selain penyediaan sarana kesehatan, pemerintah juga terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui peneyediaan tenaga kesehatan. Masing-masing kecamatan telah memiliki puskesmas, didukung oleh 774 tenaga kesehatan yang mencakup dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya. Keberadaan puskesmas di setiap kecamatan merupakan pencapaian penting dalam pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli (Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, 2023). Selain itu, keberadaan bidan dan tenaga kesehatan hingga Tingkat desa sangat membantu masyarakat, khususnya dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan penyakit, serta pemberian pertolongan pertama. Dengan semakin meratanya sarana dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan Masyarakat terus meningkat secara berkelanjutan.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan perumahan di Kota Gunungsitoli merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seiring pertumbuhan penduduk. Pada awal pembentukannya, kondisi permukiman di kota ini masih jauh dari ideal — banyak hunian belum memenuhi standar kelayakan dari segi kualitas bangunan, sanitasi, maupun infrastruktur penunjang. Pemerintah Kota Gunungsitoli pun mulai melaksanakan intervensi secara sistematis melalui berbagai program pusat dan daerah, salah satunya

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR yang menyasar peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Upaya tersebut menunjukkan hasil yang nyata. Rasio rumah layak huni meningkat dari 73,97% pada tahun 2016 menjadi 78,73% pada tahun 2020, sementara persentase lingkungan perumahan yang tertata melonjak signifikan dari 20,12% menjadi 56,32% dalam periode yang sama. Pada tahun 2021, persentase luas permukiman yang tertata kembali meningkat menjadi 76,16%. Kendati demikian, permukiman kumuh seluas sekitar 394 hektare yang tersebar di berbagai wilayah kota masih menjadi tantangan yang memerlukan penanganan berkelanjutan.

Memasuki periode 2022–2024, program perbaikan RTLH terus digencarkan melalui alokasi APBD maupun bantuan pemerintah pusat. Dari sisi sanitasi, akses layak bagi rumah tangga juga terus meningkat sebagai bagian dari pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs). Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat mempercepat terwujudnya hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Gunungsitoli.

KESIMPULAN

Kota Gunungsitoli resmi berdiri sebagai daeraah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 setelah melalui proses pemekaran dari Kabupaten Nias yang Panjang. Pembentukan kota ini dilatarbelakangi oleh semangat desentralisasi era reformasi, aspirasi kuat masyarakat Nias untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan yang lebih baik, serta perjuangan sistematis para tokoh lokal khususnya Ir. Lakhomizaro Zebua melalui BPP dan pemerintah daerah Kabupaten Nias di bawah Bupati Binahati B. Baeha. Selama periode 2008-2024, Kota Gunungsitoli mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai bidang. Pembangunan pusat pemerintahan yang diresmikan pada tahun 2016 menjadi tonggak penting konsolidasi kelembagaan. Pasar Nou direvitalisasi menjadi semi-modern dan rampung pada tahun 2021. Infrastruktur jalan meningkat dengan persentase jalan mantap mencapai 73,99% pada tahun 2024, melampaui target RPJMD. Pelabuhan Gunungsitoli mengalami revitalisasi terminal penumpang yang selesai pada November 2024. Bandara Binaka terus berkembang untuk mengakomodasi pesawat berbadan besar melalui pelebaran runway. Di bidang pendidikan, jumlah sekolah meningkat menjadi 166 unit pada tahun 2023/2024, sementara fasilitas kesehatan berkembang menjadi 53 unit pada tahun 2024 dengan setiap kecamatan telah memiliki puskesmas. Meskipun telah terjadi perkembangan yang cukup pesat, tantangan masih ada terutama ketimpangan pembangunan antarwilayah khususnya antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adisasmita, R. (2006). Pengembangan Wilayah Kota dan Desa. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli. (2025). Kota Gunungsitoli Dalam Angka 2025. Gunungsitoli: BPS Kota Gunungsitoli.

Bintarto. (1983). Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Daliman. (2012). Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli. (2023). Profil Kesehatan Kota Gunungsitoli. Gunungsitoli: Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli. (2024). Laporan Kinerja Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2024. Gunungsitoli: Dinas PUTR.

Emelia. (2013). Tanjungpinang: Dinamika Perkembangan Sebuah Kota di Kepulauan Riau (1983–2010). Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.

Nina Herlina. (2020). Metode Sejarah. Bandung: Satya Historika.

Nurcholis, C., & Rachman, A. S. (2011). Kinerja Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran Daerah Kasus Kota Depok. Prosiding Simposium Nasional Otonomi Daerah, hlm. 259.

Pemerintah Kota Gunungsitoli. (2021). Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021–2026. Gunungsitoli: Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Pemerintah Kota Gunungsitoli. (2022). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli. Gunungsitoli: Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Sjamsuddin, H. (2007). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.

Suryadi, A. (2021). Menapak Indonesia: Menelusuri Setiap Wilayah Jilid 1 (Pulau Sumatra). Bojonggenteng: CV Jejak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota

Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Vidiana, R. V. (2019). Sejarah Kota Lubuksikaping Masa Otonomi Daerah (2000–2015). Skripsi. Padang: Universitas Andalas.

Yunus, H. S. (2005). Klasifikasi Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal/Skripsi :

Eisenring, D. D., Najib, M., Amar., & Magfira, A. P. (2022). Perkembangan Fisik dan Pola Ruang Kota pada Kawasan Perkotaan Luwuk di Kabupaten Banggai. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Tadulako, 1(2).

Ilham Daeng Makkelo. (2017). Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis. Journal of Cultural Sciences, 12(2), 84.

Mendrofa, H. M. P. (2012). Perkembangan dan Ketersediaan Fasilitas di Kota Gunungsitoli Pasca Gempa Tahun 2006–2010. Skripsi. Medan: Universitas Negeri Medan.

Wawancara :

Wawancara penulis dengan Merianto Mendrofa (Bapperida Kota Gunungsitoli) pada Februari 2026, Kantor Bapperida Kota Gunungsitoli.

Wawancara penulis dengan Ir. Analisman Harefa, ST (Kepala Bapperida Kota Gunungsitoli) pada Februari 2026, Kantor Bapperida Kota Gunungsitoli.